

---

## PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

**Baharuddin Umar R<sup>\*1</sup>, Rustan DM<sup>2</sup>, Sylvia<sup>3</sup>**

<sup>\*1</sup>Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

<sup>2</sup>Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

<sup>3</sup>Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

**E-mail:** <sup>\*1</sup>bojesungu@yahoo.com, <sup>2</sup>rustandm@stienobel-indonesia.ac.id, <sup>3</sup>sylvia.sjarlis2013@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial dan simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi dan variabel yang berpengaruh dominan terhadap akuntabilitas kinerja instansi, penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan mengambil 54 orang pegawai sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi, secara simultan variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi dan variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap akuntabilitas kinerja instansi.

**Kata kunci:** Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi.

### ABSTRACT

*This study aims to determine and analyze the effect of clarity on budget targets, reporting systems and utilization of information technology partially and simultaneously on agency performance accountability and variables that have a dominant effect on agency performance accountability. took 54 employees as research samples. The results showed that partially the clarity of budget targets, reporting systems and utilization of information technology had a significant positive effect on agency performance accountability, simultaneously the variables clarity of budget objectives, reporting systems and utilization of information technology had a significant positive effect on agency performance accountability and the variable utilization of information technology has the most dominant influence on agency performance accountability.*

**Keywords:** *Clarity of Budget Targets, Reporting Systems, Information Technology Utilization, Agency Performance Accountability.*

### PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik merupakan organisasi bersifat non profit yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018). Organisasi sektor publik berorientasi pada pemberian pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat. Instansi pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik adalah semua lembaga pemerintahan yang melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan di lingkungan eksekutif baik itu di pusat maupun daerah termasuk komisi-komisi, dewan dan badan yang mendapat dana dari APBN/APBD.

Kualitas pelayanan publik pada sebuah daerah menjadi perhatian bersama, peningkatan kualitas pelayanan untuk publik penting dijalankan pemerintah untuk terselenggaranya kepuasan kerja pada masyarakat. Para pejabat publik, komponen-

komponen pada masyarakat sipil serta aspek bisnis sama-sama mempunyai kepentingan kepada perbaikan kinerja pelayanan publik. Sebagaimana dipahami, tujuan pokok sektor publik yakni pemberian pelayanan publik bukan guna mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun hingga sekarang kita belum mengerti bagaimana sebenarnya pelayanan yang hendak didapat rakyat selaku warga negara serta seperti apa idealnya pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Adanya kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.

Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang tercantum di dalam dasar hukum atau aturan organisasi, karenanya organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefensiskan hasil dari proses organisasi. Perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengendalian dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggung jawaban publik.

Tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah menyebabkan seluruh instansi pemerintah wajib menyusun perencanaan strategis. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Gubernur Sulawesi Barat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Gubernur dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK). Disamping itu penyusunan LAKIP juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Dalam penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dievaluasi terdapat lima komponen yaitu: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja. Kemudian diakumulasi bobot penilaiannya dan diberi nilai evaluasi dari AA, A, BB, B, CC, C dan D.

**Tabel 1. Nilai Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Nilai	Skor
AA (sangat memuaskan)	90-100
A (memuaskan)	80-90
BB (sangat baik)	70-80
B (baik)	60-70
CC (cukup)	50-60
C (kurang)	30-50
D (sangat kurang)	0-30

Sumber: <https://www.menpan.go.id/>, data diolah tahun 2023

Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat lima tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat**

No	Tahun	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1.	2018	CC	51,88	Cukup
2.	2019	CC	54,05	Cukup
3.	2020	CC	56,84	Cukup
4.	2021	B	60,61	Baik
5.	2022	B	63,14	Baik

Sumber: <https://bpkpd.sulbarprov.go.id/>, data diolah tahun 2023

Kejelasan sasaran anggaran, yang merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut sehingga dapat mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi tercapainya akuntabilitas kinerja.

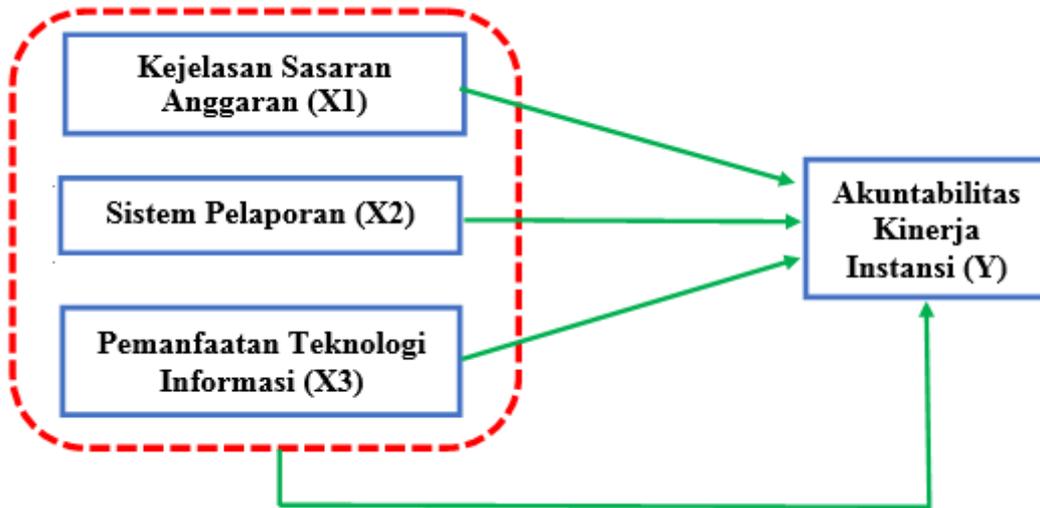
Selain rencana anggaran, sistem pelaporan juga diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan.

Penerapan akuntabilitas keuangan mewajibkan instansi memberikan laporan kinerja keuangan yang telah dilakukan pada kurun waktu tersebut, dalam tujuan mewujudkan pemerintah yang baik dan akuntabel, karena itu terdapat indikasi dalam pengembangan penerapan akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata. Penerapan sistem akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata dapat difasilitasi dengan menggunakan teknologi informasi (TI).

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi (TI) telah merambah ke berbagai bidang kehidupan dan tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja suatu organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu bagian yang berpengaruh dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik dapat membantu dalam penyelenggaraan negara menuju value for money (ekonomis, efektif dan efisien) menuju upaya yang optimal serta juga dapat menghemat waktu (time saving) dan menghemat biaya (cost saving). Namun, pengimplementasian pemanfaatan teknologi informasi yang tidak atau belum mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, dapat menciptakan pengimplementasian pemanfaatan teknologi informasi menjadi percuma.

Berdasar pada uraian diatas maka penelitian ini disusun melalui konsep kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1. Kerangka Konseptual**



Melalui gambar kerangka konsep di atas maka akan terdapat tiga hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi.
2. Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama (Simultan) terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi.
3. Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi.

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian survey yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun, 2011). Survey merupakan studi yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu.

Penelitian ini dilaksanakan dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Waktu penelitian dilakukan mulai Juni 2023 sampai dengan juli 2023. Dengan sampel penelitian berjumlah 54 Pegawai.

Teknik analisis data menggunakan analisa regresi linier berganda yang didahului dengan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap data penelitian, selanjutnya analisis regresi linear berganda kemudian uji hipotesis digunakan uji t untuk menguji hubungan seara parsial dan uji f untuk mengetahui hubungan secara simultan. Analisis kebermaknaan dalam penelitian ini digunakan melalui uji koefisien determinasi (R square).

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Uji Validitas**

Pengujian validitas instrumen yaitu menghitung koefisien korelasi antara skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikansi 95% atau  $\alpha = 0.05$  (Santoso, 2015). Validitas dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi *product moment* kriteria

pengujian yang digunakan pada instrumen tersebut valid jika nilai  $r \geq 0,2387$  (R Tabel). Adapun hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel**

No	Variabel	Butir Instrumen	r Hitung	r Tabel	Status
1	Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	KSA 1	0,723	0,2681	Valid
		KSA 2	0,787	0,2681	Valid
		KSA 3	0,707	0,2681	Valid
		KSA 4	0,528	0,2681	Valid
		KSA 5	0,706	0,2681	Valid
2	Sistem Pelaporan (X2)	SP 1	0,731	0,2681	Valid
		SP 2	0,735	0,2681	Valid
		SP 3	0,717	0,2681	Valid
		SP 4	0,479	0,2681	Valid
		SP 5	0,763	0,2681	Valid
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	TI 1	0,597	0,2681	Valid
		TI 2	0,706	0,2681	Valid
		TI 3	0,910	0,2681	Valid
		TI 4	0,789	0,2681	Valid
		TI 5	0,742	0,2681	Valid
4	Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y)	AKI 1	0,663	0,2681	Valid
		AKI 2	0,844	0,2681	Valid
		AKI 3	0,790	0,2681	Valid
		AKI 4	0,856	0,2681	Valid
		AKI 5	0,883	0,2681	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas maka diperoleh angka korelasi ( $r_{hitung}$ ) yang ternyata hasilnya lebih besar apabila dibandingkan dengan r tabel yang disyaratkan yaitu sebesar 0,2681, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

### Uji Reliabilitas

Kehandalan instrumen dalam penelitian akan dianalisis dengan teknik *alpha cronbach* dengan menggunakan bantuan sarana komputer program SPSS. Nilai batas (*cut of point*) yang diterima untuk tingkat *alpha cronbach* adalah  $\geq 0.70$ , walaupun ini bukan merupakan standar absolut (Sekaran, 2011). Instrumen dianggap telah memiliki tingkat keandalan yang dapat diterima jika nilai koefisien reliabilitas yang terukur adalah  $\geq 0.70$ . Adapun hasil uji reliabilitas dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian**

Variabel	Cronbach's Alpha	Cut of Point	Status
Kejelasan Sasaran Anggaran (X <sub>1</sub> )	0,711	0,70	Reliabel
Sistem Pelaporan (X <sub>2</sub> )	0,709	0,70	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,809	0,70	Reliabel

Variabel	Cronbach's Alpha	Cut of Point	Status
(X <sub>3</sub> )			
Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y)	0,861	0,70	Reliabel

Dari pengujian reliabilitas dengan metode *Cronbach's Alpha* dapat diketahui bahwa nilai koefisien reliabilitas yang diukur adalah  $\geq 0,70$ , maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki tingkat keandalan yang dapat diterima.

### Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9.912	2.899		-3.420	.001
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.463	.130	.317	3.566	.001
	Sistem Pelaporan	.548	.211	.280	2.597	.012
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.501	.119	.417	4.206	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi

Dari tabel diatas dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -9,912 + 0,463X_1 + 0,548X_2 + 0,501X_3 + e$$

Koefisien regresi variabel X<sub>1</sub> sebesar 0,463 dan bernilai positif, artinya ialah bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Semakin meningkatnya nilai kejelasan sasaran anggaran, maka akan semakin meningkat pula nilai dari akuntabilitas kinerja instansi. Koefisien regresi variabel X<sub>2</sub> sebesar 0,548 dan bernilai positif, artinya ialah bahwa variabel sistem pelaporan memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Semakin meningkatnya nilai sistem pelaporan, maka akan semakin meningkat pula nilai dari akuntabilitas kinerja instansi. Koefisien regresi variabel X<sub>3</sub> sebesar 0,501 dan bernilai positif, artinya ialah bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Semakin meningkatnya nilai pemanfaatan teknologi informasi, maka akan semakin meningkat pula nilai dari akuntabilitas kinerja instansi.

### Uji t (Secara Parsial)

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat menjelaskan bahwa:

- 1) Pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran (X<sub>1</sub>) terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi (Y)

Nilai t hitung variabel kejelasan sasaran anggaran daerah sebesar 3,566 dan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 2,007. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung > t tabel (3,566 > 2,007) dan nilai signifikansi sebesar 0.001 < 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan

sasaran anggaran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi.

- 2) Pengaruh variabel sistem pelaporan (X2) terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi (Y)

Nilai t hitung variabel sistem pelaporan sebesar 2,597 dan tingkat signifikansi sebesar 0,012. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 2,007. Hal ini menunjukkan bahwa  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  ( $2,597 > 2,007$ ) dan nilai signifikansi sebesar  $0,012 < 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pelaporan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi.

- 3) Pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi (Y)

Nilai t hitung variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 4,206 dan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 2,007. Hal ini menunjukkan bahwa  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  ( $4,206 > 2,007$ ) dan nilai signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi.

### Uji F (Secara Simultan)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Apabila nilai Fhitung  $\geq$  dari nilai Ftabel berarti variabel bebasnya secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel terikat, maka digunakan probabilitas atau peluang kesalahan 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Jika probabilitas  $< \alpha$  (0,05). Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:

**Tabel 6. Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	691.054	3	230.351	51.794	.000 <sup>b</sup>
	Residual	222.372	50	4.447		
	Total	913.426	53			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi						
b. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan						

Nilai F hitung seluruh variabel independent sebesar 51,794 dan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Adapun kriteria dalam uji simultan ini ialah ketika seluruh variabel independent memiliki nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. F tabel pada penelitian ini ialah sebesar 2,79. Hal ini menunjukkan bahwa  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$  ( $51,794 > 2,79$ ) dan nilai signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi.

### Uji Beta (Secara Dominan)

Berdasarkan kolom standardized coefficients beta pada tabel 5.21 dapat ditemukan variabel yang paling berpengaruh dominan diantara variabel independent lainnya. Berdasarkan kolom standardized coefficients beta tersebut menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai sebesar 0,317, variabel sistem pelaporan sebesar 0,280 dan variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,417. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi merupakan variabel paling dominan yang memiliki pengaruh terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi sebesar 41,7%.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik, dan aktivitas pengendalian dalam menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependen yaitu akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom R square, yang ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.870 <sup>a</sup>	.757	.742	2.109	1.540
a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan					
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi					

Nilai R Square pada penelitian ini ialah sebesar 0,757. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independent memiliki hubungan sebesar 75,7% terhadap variabel dependent yaitu variabel akuntabilitas kinerja instansi. Nilai R Square ini juga mengindikasikan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independent secara bersama-sama (simultan) dapat mempengaruhi variabel dependent yaitu variabel akuntabilitas kinerja instansi sebesar 0,757 atau 75,7%. Sedangkan sisanya ( $100-75,7=24,3$ ) 24,3% dapat dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, selanjutnya akan dibahas hasil penelitian sebagai berikut:

### **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi, hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya variabel kejelasan sasaran anggaran maka akan semakin meningkatkan pula variabel akuntabilitas kinerja instansi. Begitu pula sebaliknya, jika variabel kejelasan sasaran anggaran menurun, maka tingkat

akuntabilitas kinerja instansi juga ikut menurun. Hasil ini juga sejalan dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa dalam setiap tindakannya pemerintah akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Kegiatan ini tentunya sangat membutuhkan kejelasan sasaran anggaran yang matang agar mendapatkan hasil efektif, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aprilia Bayan, et.al (2020) yang menyatakan bahwa Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan anggaran, dengan adanya anggaran yang jelas maka, akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Sedangkan Awwaliyah Nur Azizahawwazizah Dan Dini Widyawati (2020) menyatakan bahwa kejelasan anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran tersebut ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan untuk mempermudah dimengerti orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut.

### **Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat**

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh antara sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi, hal ini mengemukakan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara sistem pelaporan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya bahwa semakin baik sistem pelaporan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat. Sebaliknya jika sistem pelaporan rendah maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan menurun. Sistem pelaporan merupakan sistem yang diperlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Tujuan sistem pelaporan yaitu mengurangi tingkat ketidakpastian yang dihadapi dan yang mempengaruhi perilaku pengambil keputusan dengan cara yang positif dalam menghadapi masalah. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maka perlu dilakukan pelaporan yang sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan anggaran. Pemerintah berkewajiban dalam memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya sistem pelaporan yang baik maka akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lutfiah Virgita Budiani, Nur Fadrijh Asyik (2021), Deni Harianto, Kennedy, Arumega Zarefar (2021), Awwaliyah Nur Azizah & Dini Widyawati (2020), Nur Heni Safitri (2020), Dewi Aprilianti, Mulyaning Wulan, Herwin Kurniawan (2020). Nur Heni Safitri (2020) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan yang baik akan berbanding lurus dengan akuntabilitas kerjanya, karena sistem pelaporan yang baik adalah jika laporan tersebut disusun secara jujur, objektif dan transparan, sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan persyaratan pelaporan keuangan organisasi sektor publik. Dengan sistem pelaporan yang baik maka akuntabilitas kinerja akan mengikutinya.

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi, hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya variabel pemanfaatan teknologi informasi maka akan semakin meningkatkan pula variabel akuntabilitas kinerja instansi. Begitu pula sebaliknya, jika variabel pemanfaatan teknologi informasi menurun, maka tingkat akuntabilitas kinerja instansi juga ikut menurun. Hasil ini menjelaskan semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh pegawai yang bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas operasionalnya sehari-hari dapat berperan dalam memenuhi kewajiban akan kepada masyarakat. Sehingga pemerintah dengan lebih mudah dan efisien memberikan layanan kepada masyarakat dan mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang semakin baik. Hal ini sejalan dengan implikasi teori stewardship yang menjelaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus dapat bertindak secara ekonomis dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya, membuat pertanggungjawaban yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Deni Harianto, Kennedy, Arumega Zarefar (2021), Silvia Yunita Rakhma, Endah Sulistyowati (2021), Rizaldy Bagus Faiz Kusuma, Arik Susbiyani, Elok Fitriya (2020), Ferlin Safira, Kartika Rachma Sari & Yuli Antina Aryani (2022), Da'ieva Arja Julia & Wahidahwati (2020). Silvia Yunita Rakhma, Endah Sulistyowati (2021) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota diterima. Saat ini pemanfaatan teknologi informasi dalam lingkup pemerintahan sering dikenal sebagai E-Government, pemerintah digital, pemerintah online bahkan pemerintah transformasi.

### **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Bersama-Sama (Simultan) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi. Ketiga variabel ini akan sangat efektif bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pada tahun-tahun kedepannya. Dengan meningkatkan kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama maka bukan tidak mungkin akuntabilitas kinerja instansi akan ikut meningkat.

### **Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat**

Berdasarkan kolom standardized coefficients beta dapat ditemukan variabel yang paling berpengaruh dominan diantara variabel independent lainnya. Berdasarkan kolom standardized coefficients beta tersebut menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran

anggaran memiliki nilai sebesar 0,317, variabel sistem pelaporan sebesar 0,280 dan variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,417. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi merupakan variabel paling dominan yang memiliki pengaruh terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi sebesar 41,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang sangat vital pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

## **KESIMPULAN**

Dari data analisis yang diperoleh dan dijelaskan pada bab diatas dapat diperoleh kesimpulan:

1. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Secara simultan variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Variabel pemanfaatan teknologi informasi menjadi variabel yang paling dominan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dibandingkan dengan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustin, Karismawati. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi kasus Pada SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta). Naskah Publikasi.
- Awwaliyah, Nur, Azizah. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja. E-Journal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (ITBSIA) Surabaya.
- Deni, Harianto., Kennedy., Arumega, Zarefar. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP). JAA Vol. 6, No. 1, Oktober 2021.
- Dewi, Aprilianti., Mulyaning, Wulan., Herwin, Kurniawan. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol. 9, No. 2, Juli 2020.
- Lutfiah, Virgita, Budiani., Nur, Fadjrih, Asyik. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 10, Nomor 2, Februari 2021.

Rizaldy, Bagus, Faiz, Kusuma., Arik, Susbiyani., Elok, Fitriya. (2020). Pengaruh Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo). E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi.

Singarimbun, M., & Effendi, S. (2011). Metode Penelitian Survai. Jakarta. LP3S.

Silvia, Yunita, Rakhma., Endah, Sulistyowati. (2021). Determinan Penganggaran, Sistem Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 10, Nomor 8, Agustus 2021.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfab.